

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG DI KABUPATEN SUMBAWA

Syaifuddin Iskandar¹, Bagas Nusantara^{2*}, Heri Kurniawansyah³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: bagas1354@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 12 Mei 2024</i> <i>Revised: 03 Juni 2024</i> <i>Published: 30 June 2024</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Dari Hunger Dan Whelen (2003) sebagai pisau analisis dimana dalam teori Hunger dan Whelen Strategi meliputi 4 (empat) indikator yakni Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, Camat Unter Iwes, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam mengatasi permasalahan pindah datang penduduk, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa melakukan strategi-strategi yang sudah cukup baik, namun kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Keywords <i>Urbanisasi;</i> <i>Kependudukan;</i> <i>Strategi;</i>	

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, menjadikannya sebagai daya tarik bagi para penduduk untuk berdatangan melakukan urbanisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan penduduk yang datang pada dasarnya hasil dari inisiatif sendiri sehingga dari segi administrasi tidak terurus secara baik. Dampaknya ialah tidak terkendalinya jumlah penduduk dan persebaran penduduk menjadi tidak merata sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengancam ketertiban umum, antara lain terjadinya ledakan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, munculnya pemukiman kumuh, pengangguran, peningkatan urban crime dan masih banyak lagi masalah lain. Penduduk pindah datang juga dipicu adanya perbedaan dan tidak meratanya pembangunan antara pedesaan dan perKabupatenan yang memicu terjadinya urbanisasi.

Urbanisasi menjadi salah satu fenomena sosial yang menjadi masalah bagi seluruh negara termasuk juga Indonesia terutama bagi Kabupaten yang sedang dalam proses perkembangan. Secara umum pada dasarnya urbanisasi dapat dikatakan sebagai berpindahnya penduduk dari desa ke Kabupaten. Hal ini terjadi karena memang perKabupatenan memiliki komunitas yang

berbeda dari pedesaan seperti fasilitas dan infrastruktur yang lebih memadai sehingga lebih menjamin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibandingkan pada pedesaan.

Pada era modern sekarang ini banyak terjadi perubahan pola pemikiran masyarakat terutama pada masyarakat terdahulu dan sekarang. Zaman sekarang, para anak muda kebanyakan tidak lagi tertarik untuk bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mana bidang-bidang itu merupakan sumber mata pencarian yang biasanya dilakukan di pedesaan. Anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk bekerja dikantoran. Selain itu pada hakikatnya masyarakat era sekarang juga cenderung ingin bermukim ditempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi dilihat dari berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan serta tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga tidak mengherankan bila dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya, masyarakat akhirnya melakukan migrasi ke tempat yang lebih ideal.

Proses urbanisasi tidak bisa lepas dari konteks yang lebih luas yaitu politik dan perubahan ekonomi, sehingga urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai sebuah proses demografi saja. Secara politik, dengan adanya otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten dan Kabupaten melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses urbanisasi. Pemberian otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perkembangan ekonomi yang begitu pesat terhadap wilayah-wilayah lain. Semakin berkembangnya suatu wilayah, maka tingkat urbanisasi yang terjadi wilayah tersebut akan semakin tinggi juga. Sementara untuk kecamatan dengan tingkat arus perpindahan penduduk terendah berada di Kecamatan Unter Iwes sebanyak 150, hal ini dikarenakan Kecamatan Unter Iwes terletak dipinggir Kabupaten Sumbawa yang jaraknya cukup jauh dari pusat Kabupaten. Selain itu, data pendukung lainnya yang dapat menjelaskan fenomena pindah datang di Kabupaten Sumbawa adalah melalui data pertumbuhan ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang peristiwa kependudukan yaitu sebuah kejadian yang dialami oleh penduduk yang wajib dilaporkan karena dapat mengganggu proses administrasi, dimana dalam Pasal (1) dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Oleh karena itu bagi para penduduk pindah datang yang melakukan urbanisasi diharapkan untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan agar tidak mengganggu proses administrasi dan proses pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Ketidakterbiban administrasi kependudukan bagi penduduk pelaku pindah datang dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan, sehingga penertiban masalah administrasi kependudukan perlu dilakukan karena data kependudukan dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, artinya jika data kependudukan lengkap dan akurat maka akan mempermudah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut. Proses pengurusan surat keterangan pindah datang dapat

dilakukan dengan cara mengurusnya di daerah yang ditinggalkan oleh pemohon, lalu dilanjutkan dengan mengurusnya di daerah yang akan ditempati oleh pemohon. meminta surat pengantar RT (Rukun Tetangga)/RW (Rukun Warga), lalu mengisi formulir biodata di kelurahan, selanjutnya datang ke kecamatan untuk meminta tanda tangan surat tersebut, dan terakhir ialah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), pada proses ini KTP lama akan ditarik. Selanjutnya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) tersebut dibawa ke alamat kelurahan domisili baru dan akan mengisi formulir pindah datang, lalu bawa surat dan formulir tersebut ke kecamatan untuk meminta tanda tangan camat, lalu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada domisili baru dengan menyerahkan formulir tadi maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan surat keterangan pindah datang setelah formulir pemohon selesai diproses.

Peningkatan kualitas pelayan perlu dilakukan dengan menciptakan inovasi baru salah satunya ialah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan terobosan dari Kementerian Dalam Negeri berupa sebuah alat atau mesin seperti ATM yang dapat mencetak 23 (dua puluh tiga) jenis dokumen kependudukan. Untuk Kabupaten Sumbawa sendiri, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan satu unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mesin ini rencananya akan ditempatkan pada Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa bahwa permasalahan urbanisasi di Kabupaten Sumbawa dalam hal kependudukan, kurang lebih masalahnya mengarah pada pindah datang penduduk ke Kabupaten Sumbawa yang belum mendapat atau membawa surat pindah, sehingga secara defacto masyarakatnya berada di Kabupaten Sumbawa tetapi secara de jure masyarakatnya masih berada di daerah asal, hal ini diakibatkan karena mereka tidak mengurus datanya. Umumnya penduduk melakukan pindah datang ke Kabupaten Sumbawa yaitu untuk mencari pekerjaan dan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu penduduk pindah datang lainnya yaitu para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai swasta yang bekerja di Kabupaten Sumbawa tetapi beralamat tinggal di luar Kabupaten Sumbawa. Penduduk pindah datang yang melakukan urbanisasi ke Kabupaten Sumbawa pada dasarnya ditenggarai alasan yang umumnya hampir sama dengan KabupatenKabupaten lain. Faktor utamanya adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan. Tetapi masalah yang ditimbulkan dan paling dominan yaitu tidak tertib admistrasi kependudukan, mulai dari tidak melapor, sampai yang paling tinggi sudah menetap bertahun-tahun tetapi tidak punya dokumen kependudukan di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan tersebut dapat menyulitkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan penataan administrasi pendatang, sehingga jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan antara lain tidak diketahuinya jumlah penduduk secara pasti. Tidak tertibnya pelaksanaan administrasi juga menyulitkan dalam hal pendataan dan pemerataan penduduk, oleh karena itu harus

mendapatkan perhatian lebih agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian difokuskan pada “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar untuk mengembangkan konsep dan teori serta hubungannya dengan pemecahan masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, Peneliti menggunakan Konsep Strategi Dari Hunger Dan Wheelen (2003) sebagai pisau analisis. Adapun Strategi Menurut Hunger Dan Wheelen meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Indikator Pengamatan Lingkungan terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu internal dan eksternal, dimana internal meliputi struktur, budaya, dan sumber daya, sedangkan eksternal meliputi lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Untuk indikator Perumusan Strategi terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu misi, tujuan strategi dan kebijakan. Indikator Implementasi Strategi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu program, anggaran, dan prosedur, dan indikator Evaluasi Dan Pengendalian merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai dan menjamin jalannya strategi yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Nartin *et al.*, 2024). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menganalisis informasi dari strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam hal administrasi penduduk pindah datang yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh sehingga didapat analisis yang disajikan secara deskriptif dapat akurat dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Pengamatan Lingkungan

- a. Lingkungan Eksternal Masih ditemukan masyarakat yang enggan untuk mengurus dokumen kependudukan pindah datangnya, hal ini disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti misalnya tidak membawa surat keterangan pindah dari daerah asal, masyarakat belum merasa perlu dan belum membutuhkan, kesibukan masyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa meresponnya dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, membuat program turun langsung ke lapangan, melakukan pelayanan online, membuka pelayanan di kecamatan, dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan Internal Masyarakat ada yang telah memahami pengurusan dokumen pindah datang dan ada juga yang belum, oleh karena itu dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa harus lebih aktif lagi dalam penyampaian informasi. Dalam pengurusan dokumen kependudukan juga dapat dilakukan secara online sehingga segala sesuatunya sebenarnya lebih mudah.

2. Perumusan Strategi

- a. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa memiliki misi yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut tentunya dibutuhkan pelayanan yang professional. Hal itulah yang ingin ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
- b. Tujuan Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa di bidang pindah datang secara umum yaitu pindah datang dapat terlaksana dengan tertib. Untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi dari masyarakat berupa kesadaran dalam mengurus surat keterangan pindah bagi pelaku pindah datang.
- c. Strategi Strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang, yaitu antara lain: (1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. (2) Melakukan kegiatan Jemput Bola yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan. (3) Melakukan kerjasama dengan organisasiorganisasi kemasyarakatan. (4) Membuat grup wa pindah datang seluruh Indonesia. (5) Surat Keterangan Pindah dapat diurus secara online oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan berkoordinasi bersama Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal pemohon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana disebutkan pada pasal 31.
- d. Kebijakan Strategi yang telah dibuat juga dijadikan sebagai kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi permasalahan dibidang pindah datang penduduk.

3. Implementasi Strategi

- a. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan programnya. Adapun Peneliti menganggap bahwa program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan cukup baik.

- b. Anggaran Dalam menjalankan program-programnya, serta dalam membiayai segala bentuk akomodasinya baik pembayaran gaji pegawai, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga bersumber Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Prosedur Pengurusan dokumen pindah datang sangatlah mudah apalagi bila dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebabkan karena adanya pemangkasan alur prosedur dimana itu sangat membantu masyarakat. Pemangkasan alur tersebut mengakitkan terjadinya penyederhanaan di seluruh bagian baik dari segi persyaratan hingga waktu yang diperlukan.
- d. Pengawasan yang ketat terhadap data penduduk merupakan langkah penting lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan badan pemerintahan lainnya diperlukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara berkala terhadap basis data penduduk. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidaksesuaian data, seperti penduduk ganda atau identitas palsu. Dengan memperkuat pengawasan terhadap data, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa administrasi penduduk berjalan dengan transparan dan efisien, serta mencegah risiko penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat dan negara.
- e. Selain program registrasi, kampanye sosialisasi tentang pentingnya memiliki identitas resmi juga menjadi strategi penting dalam menertibkan administrasi penduduk. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat memiliki dokumen identitas yang sah dan terdaftar secara hukum. Melalui edukasi publik dan kegiatan sosialisasi di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat mengurangi angka penduduk yang tidak memiliki identitas atau menggunakan identitas palsu. Dengan memiliki identitas yang sah, penduduk dapat lebih mudah mengakses layanan publik, memperoleh hak-hak dasar, serta mencegah penyalahgunaan identitas.
- f. Program registrasi penduduk secara teratur merupakan salah satu strategi kunci yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin keakuratan data penduduk. Program ini tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa informasi penduduk seperti alamat tempat tinggal dan status kependudukan tetap terkini. Implementasi program ini melibatkan kolaborasi antara dinas kependudukan, pemerintah lokal, dan masyarakat. Hasil dari program ini adalah terciptanya basis data penduduk yang lebih akurat dan dapat diandalkan, yang menjadi dasar untuk pelayanan publik yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disajikan saran-saran yang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yaitu : 1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disarankan adalah 1) Pengamatan Lingkungan a) Lingkungan Eksternal Peneliti menganggap komitmen, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik oleh karena itu Peneliti menyarankan untuk tetap konsisten dalam menjalankan komitmen, kebijakan, serta kegiatan tersebut. b) Lingkungan Internal Untuk tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan benar-benar dapat sampai kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu diharapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaringan internet secara berskala agar tidak terjadi gangguan saat proses pelayanan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas administrasi penduduk, pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan keakuratan dan keabsahan data. Program registrasi penduduk teratur, kampanye sosialisasi tentang identitas resmi, dan pengawasan terhadap data merupakan tiga strategi utama yang telah terbukti efektif dalam menertibkan administrasi penduduk. Meskipun tantangan dalam implementasinya tidak sedikit, upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas administrasi penduduk akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hunger, David & Wheelen, Thomas. (2003). *Manajemen Strategis*.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi